



**Menteri Perindustrian Republik Indonesia**

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 04/M-IND/PER/2/2017

TENTANG

KETENTUAN DAN TATA CARA PENILAIAN TINGKAT KOMPONEN DALAM  
NEGERI UNTUK PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SURYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan energi listrik dan pencapaian target energi baru dan energi terbarukan sesuai dengan kebijakan energi nasional, perlu lebih mendorong pemanfaatan energi surya untuk pembangkitan energi listrik;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan daya saing industri modul surya dalam negeri sesuai dengan karakteristik industri dimaksud, perlu mengatur ketentuan dan tata cara penghitungan nilai tingkat komponen dalam negeri untuk produk dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Ketentuan dan Tata Cara Penilaian Tingkat Komponen Dalam Negeri untuk Pembangkit Listrik Tenaga Surya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);

2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54);
3. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 16/M-IND/PER/2/2011 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104);
4. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 107/M-IND/PER/11/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1806);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG KETENTUAN DAN TATA CARA PENILAIAN TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI UNTUK PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SURYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Tingkat Komponen Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat TKDN adalah besarnya komponen dalam negeri pada Pembangkit Listrik Tenaga Surya dan Modul Surya.
2. Pembangkit Listrik Tenaga Surya yang selanjutnya disingkat PLTS adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan sinar matahari sebagai sumber penghasil listrik, dengan alat utama untuk menangkap, mengubah dan menghasilkan listrik adalah fotovoltaik yang disebut secara umum Modul Surya.
3. Modul Surya adalah alat yang terdiri dari sel surya yang mengubah energi cahaya menjadi energi listrik yang digunakan pada PLTS.

4. PLTS Tersebar Berdiri Sendiri adalah PLTS yang tersebar dan langsung dihubungkan dengan beban-beban atau pemanfaat listrik tanpa jaringan distribusi.
5. PLTS Terpusat Berdiri Sendiri adalah PLTS yang ditempatkan dalam suatu bidang lokasi di mana energi listrik didistribusikan ke beban-beban pemanfaat listrik yang tidak terhubung ke jaringan Perusahaan Listrik Negara (PLN), atau yang dikenal sebagai *off-grid*.
6. PLTS Terpusat Terhubung adalah PLTS yang ditempatkan dalam suatu bidang lokasi di mana energi listrik langsung dihubungkan ke jaringan PLN, atau yang dikenal dengan *on-grid*.
7. Pemohon adalah pelaku usaha yang mengajukan permohonan penilaian TKDN.
8. Surveyor adalah lembaga yang melakukan penghitungan nilai TKDN.
9. Sertifikat TKDN, yang selanjutnya disebut sebagai Sertifikat, adalah bukti perolehan nilai TKDN berdasarkan penghitungan TKDN sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.
10. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal pembina industri logam, mesin, alat transportasi, dan elektronika di lingkungan Kementerian Perindustrian.
11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.

## BAB II

### PERHITUNGAN PENILAIAN TKDN PLTS

#### Bagian Kesatu

#### PLTS Tersebar Berdiri Sendiri

#### Pasal 2

- (1) Pemberian nilai TKDN untuk aspek barang PLTS Tersebar Berdiri Sendiri dilakukan berdasarkan pembobotan sebagai berikut:

No	Uraian	Bobot
1.	Modul Surya	40,50%
2.	Baterai	22,05%
3.	<i>Battery Control Unit</i>	10,59%
4.	Kabel	7,94%
5.	Penyangga modul	6,30%
6.	Aksesoris	2,65%

- (2) Penghitungan nilai TKDN untuk masing-masing komponen barang dilakukan dengan mengalikan nilai TKDN yang diperoleh sesuai Sertifikat dengan bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

### Pasal 3

- (1) Pemberian nilai TKDN untuk aspek jasa PLTS Tersebar Berdiri Sendiri dilakukan berdasarkan pembobotan sebagai berikut:

No	Uraian	Bobot
1.	Pengiriman	6,67%
2.	Pemasangan	3,33%

- (2) Nilai TKDN untuk jasa pengiriman diberikan sebesar:
- 100% apabila dilakukan oleh badan usaha dalam negeri dan alat kerja dimiliki oleh badan usaha dalam negeri; dan
  - 0% apabila tidak dilakukan oleh badan usaha dalam negeri dan/atau alat kerja tidak dimiliki oleh badan usaha dalam negeri.
- (3) Nilai TKDN untuk jasa pemasangan diberikan sebesar:
- 100% apabila dilakukan oleh badan usaha dalam negeri; dan
  - 0% apabila tidak dilakukan oleh badan usaha dalam negeri.
- (4) Penghitungan nilai TKDN untuk masing-masing komponen jasa diberikan dengan mengalikan nilai TKDN yang diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dengan bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 4

Nilai TKDN untuk aspek gabungan barang dan jasa PLTS Tersebar Berdiri Sendiri diperoleh dari penjumlahan nilai TKDN barang yang diperoleh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dengan nilai TKDN jasa yang diperoleh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4).

Bagian Kedua

PLTS Terpusat Berdiri Sendiri

Pasal 5

- (1) Penghitungan TKDN untuk aspek barang PLTS Terpusat Berdiri Sendiri dilakukan dengan rincian pembobotan sebagai berikut:

No	Uraian	Bobot
1.	Baterai	25,20%
2.	Penyangga modul	20,70%
3.	Inverter dan <i>Solar Charge Controler</i>	13,50%
4.	Modul surya	13,14%
5.	Kabel (AC dan DC)	7,20%
6.	DC <i>combiner box</i>	3,06%
7.	<i>Distribution panel</i>	2,70%
8.	<i>Energy limiter</i>	2,70%
9.	Sistem Proteksi	1,80%

- (2) Penghitungan nilai TKDN untuk masing-masing komponen barang dilakukan dengan mengalikan nilai TKDN yang diperoleh sesuai Sertifikat dengan bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 6

- (1) Penghitungan TKDN untuk aspek jasa PLTS Terpusat Berdiri Sendiri dilakukan dengan rincian pembobotan sebagai berikut:

No	Uraian	Bobot
1.	Pengiriman	4,67%
2.	Pemasangan	3,33%
3.	Konstruksi	2,00%

- (2) Nilai TKDN untuk jasa pengiriman diberikan sebesar:
  - a. 100% apabila dilakukan oleh badan usaha dalam negeri dan alat kerja dimiliki oleh badan usaha dalam negeri; dan
  - b. 0% apabila tidak dilakukan oleh badan usaha dalam negeri dan/atau alat kerja tidak dimiliki oleh badan usaha dalam negeri.
- (3) Nilai TKDN untuk jasa pemasangan diberikan sebesar:
  - a. 100% apabila dilakukan oleh badan usaha dalam negeri; dan
  - b. 0% apabila tidak dilakukan oleh badan usaha dalam negeri.
- (4) Nilai TKDN untuk jasa konstruksi diberikan sebesar:
  - a. 100% apabila dilakukan oleh badan usaha dalam negeri; dan
  - b. 0% apabila tidak dilakukan oleh badan usaha dalam negeri.
- (5) Penghitungan nilai TKDN untuk masing-masing komponen jasa diberikan dengan mengalikan nilai TKDN yang diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dengan bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 7

Nilai TKDN untuk aspek gabungan barang dan jasa PLTS Terpusat Berdiri Sendiri diperoleh dari penjumlahan nilai TKDN barang yang diperoleh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dengan nilai TKDN jasa yang diperoleh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5).

#### Bagian Ketiga

#### PLTS Tepusat Terhubung

#### Pasal 8

- (1) Penghitungan TKDN untuk aspek barang PLTS Terpusat Terhubung dilakukan dengan rincian pembobotan sebagai berikut:

No	Uraian	Bobot
1.	Modul surya	40,50%
2.	Inverter	13,50%
3.	Penyangga modul	10,80%
4.	Distribution panel	6,30%
5.	Travo	5,40%
6.	DC combiner box	5,40%
7.	Sistem Proteksi	4,50%
8.	Kabel (AC dan DC)	3,60%

- (2) Penghitungan nilai TKDN untuk masing-masing komponen barang dilakukan dengan mengalikan nilai TKDN yang diperoleh sesuai Sertifikat dengan bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 9

- (1) Penghitungan TKDN untuk aspek jasa PLTS Terpusat Terhubung dilakukan dengan rincian pembobotan sebagai berikut:

No	Uraian	Bobot
1.	Pengiriman	2,20%
2.	Pemasangan	5,40%
3.	Konstruksi	2,40%

- (2) Nilai TKDN untuk jasa pengiriman diberikan sebesar:
- 100% apabila dilakukan oleh badan usaha dalam negeri dan alat kerja dimiliki oleh badan usaha dalam negeri; dan
  - 0% apabila tidak dilakukan oleh badan usaha dalam negeri dan/atau alat kerja tidak dimiliki oleh badan usaha dalam negeri.
- (3) Nilai TKDN untuk jasa pemasangan diberikan sebesar:
- 100% apabila dilakukan oleh badan usaha dalam negeri; dan
  - 0% apabila tidak dilakukan oleh badan usaha dalam negeri.
- (4) Nilai TKDN untuk jasa konstruksi diberikan sebesar:
- 100% apabila dilakukan oleh badan usaha dalam negeri; dan

- b. 0% apabila tidak dilakukan oleh badan usaha dalam negeri.
- (5) Penghitungan nilai TKDN untuk masing-masing komponen jasa diberikan dengan mengalikan nilai TKDN yang diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dengan bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 10

Nilai TKDN untuk aspek gabungan barang dan jasa PLTS Terpusat Terhubung diperoleh dari penjumlahan nilai TKDN barang yang diperoleh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dengan nilai TKDN jasa yang diperoleh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5).

### BAB III

#### PERHITUNGAN PENILAIAN TKDN KOMPONEN PLTS

##### Bagian Kesatu

##### Penilaian TKDN Modul Surya

#### Pasal 11

Penilaian TKDN produk Modul Surya dilakukan dengan pembobotan sebagai berikut:

- a. material diberikan bobot 91% (sembilan puluh satu persen);
- b. tenaga kerja diberikan bobot 5% (lima persen); dan
- c. mesin produksi diberikan bobot 4% (empat persen).

#### Pasal 12

- (1) Penghitungan TKDN untuk material Modul Surya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dilakukan berdasarkan rincian pembobotan sebagai berikut:

No	Uraian	Bobot
1.	Sel Surya	50,00%
2.	<i>Tempered Glass</i>	12,00%
3.	<i>PV Junction box</i>	8,00%
4.	<i>Backsheet</i>	4,00%



5.	<i>Frame</i>	9,00%
6.	<i>Film Eva</i>	4,00%
7.	<i>PV Ribbon</i>	2,00%
8.	<i>Solar silicon</i>	2,00%

- (2) Penilaian TKDN untuk komponen penyusun Modul Surya yang diproduksi di dalam negeri diberikan nilai TKDN sesuai dengan besaran bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penilaian TKDN untuk komponen penyusun modul surya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berasal dari luar negeri diberikan nilai TKDN sebesar 0% (nol persen) per komponen.

#### Pasal 13

Penghitungan TKDN untuk tenaga kerja Modul Surya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b diberikan sebesar:

- a. 5% apabila seluruhnya dikerjakan oleh Warga Negara Indonesia (WNI); dan
- b. 0% apabila tidak seluruhnya dikerjakan oleh WNI.

#### Pasal 14

Penghitungan TKDN untuk mesin produksi modul surya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c diberikan sebesar:

- a. 4% apabila mesin produksi dimiliki sepenuhnya oleh badan usaha dalam negeri; dan
- b. 0% apabila mesin produksi tidak sepenuhnya dimiliki oleh badan usaha dalam negeri.

#### Pasal 15

- (1) Penghitungan TKDN untuk material sel surya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dilakukan berdasarkan rincian pembobotan sebagai berikut:

<b>No</b>	<b>Uraian</b>	<b>Bobot</b>
1.	Pengadaan pasir silika	2,50%
2.	Pembuatan <i>silicon metallurgical grade</i>	7,50%
3.	Pembuatan <i>silicon solar grade</i>	15,00%

4.	Pembuatan ingot	5,00%
5.	Pembuatan <i>brick</i>	2,50%
6.	Pembuatan <i>wafer</i>	2,50%
7.	Pembuatan <i>blue cell</i>	7,50%
8.	<i>Printing cell</i>	7,50%

- (2) Penilaian TKDN untuk komponen penyusun sel surya yang diproduksi di dalam negeri diberikan nilai TKDN sesuai dengan besaran bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penilaian TKDN untuk komponen penyusun modul surya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berasal dari luar negeri diberikan nilai TKDN sebesar 0% per komponen.

#### Bagian Kedua

#### Penilaian TKDN Komponen Selain Modul Surya

#### Pasal 16

- (1) Penghitungan nilai TKDN barang selain Modul Surya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), dan Pasal 8 ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 16/M-IND/PER/2/2011 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri dan/atau perubahannya.
- (2) Nilai TKDN barang selain Modul Surya diperoleh dengan mengalikan nilai TKDN yang diperoleh sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai Sertifikat dikalikan dengan bobot sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), dan Pasal 8 ayat (1).

BAB IV  
TATA CARA PENERBITAN SERTIFIKAT

Bagian Kesatu  
Permohonan Penilaian TKDN

Pasal 17

- (1) Penilaian TKDN PLTS dilakukan berdasarkan permohonan penilaian dari Pemohon.
- (2) Pemohon mengajukan permohonan penilaian TKDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal melalui Unit Pelayanan Publik Kementerian Perindustrian (UP2).
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini dan melampirkan:
  - a. fotokopi Surat Perintah Kerja (SPK) dari pihak penyelenggara;
  - b. penilaian sendiri TKDN untuk produk yang dinilai;
  - c. Sertifikat dari masing-masing komponen PLTS yang dimiliki.
- (4) Format penilaian sendiri TKDN untuk produk yang dinilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 18

- (1) UP2 memeriksa kelengkapan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dalam waktu 1 (satu) hari kerja.
- (2) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah lengkap, UP2 menyampaikan berkas permohonan kepada Direktur Jenderal.
- (3) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum lengkap, UP2 menyampaikan ketidaklengkapan kepada Pemohon.

Pasal 19

- (1) Terhadap permohonan yang telah disampaikan oleh UP2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), Direktur Jenderal melakukan pemeriksaan atas kebenaran permohonan.
- (2) Pemeriksaan kebenaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka:
  - a. meneliti keabsahan dan kesesuaian dokumen permohonan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. meneliti kesiapan Pemohon dalam melakukan penilaian TKDN.

Pasal 20

Dalam waktu maksimal 5 (lima) hari kerja setelah penyampaian permohonan oleh UP2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Direktur Jenderal menerbitkan:

- a. surat persetujuan penilaian TKDN dalam hal permohonan telah lengkap dan benar sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; atau
- b. surat penolakan penilaian TKDN dalam hal permohonan belum lengkap atau tidak benar sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 21

Pemohon menyampaikan surat persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a kepada Surveyor untuk dilakukan penilaian TKDN.

Pasal 22

- (1) Penilaian TKDN Modul Surya dilakukan berdasarkan permohonan penilaian dari Pemohon.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini dan melampirkan:

- a. profil perusahaan;
  - b. Izin Usaha Industri (IUI);
  - c. penilaian sendiri TKDN untuk produk yang dinilai;
  - d. faktor-faktor pembelian barang penyusun PLTS.
- (3) Format penilaian sendiri TKDN untuk produk yang dinilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 23

Ketentuan permohonan penilaian TKDN PLTS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 21 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap permohonan penilaian TKDN Modul Surya selain sebagaimana diatur dalam Pasal 22.

#### Bagian Kedua

#### Surveyor

#### Pasal 24

Penilaian TKDN dilakukan oleh Surveyor.

#### Pasal 25

- (1) Hasil penilaian TKDN PLTS yang dilakukan oleh Surveyor dituangkan dalam laporan hasil verifikasi TKDN PLTS.
- (2) Hasil penilaian TKDN Modul Surya yang dilakukan oleh Surveyor dituangkan dalam laporan hasil verifikasi TKDN Modul Surya.
- (3) Laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus diselesaikan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak penyampaian surat persetujuan penilaian TKDN kepada Surveyor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
- (4) Laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Menteri dengan tembusan kepada Pemohon.

Pasal 26

- (1) Berdasarkan laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3), Menteri menerbitkan Sertifikat.
- (2) Penerbitan Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Direktur Jenderal.
- (3) Sertifikat untuk TKDN PLTS berlaku untuk setiap kegiatan pekerjaan pembangunan PLTS yang bersangkutan.
- (4) Sertifikat untuk TKDN Modul Surya berlaku selama 3 (tiga) tahun.

Pasal 27

- (1) Surveyor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Pelaksanaan penghitungan TKDN oleh Surveyor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan berdasarkan prinsip:
  - a. keterbukaan;
  - b. pelayanan prima; dan
  - c. akuntabilitas.
- (3) Surveyor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan hasil pelaksanaan pekerjaannya kepada Menteri.

BAB V

PENGAWASAN

Pasal 28

- (1) Direktur Jenderal melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penghitungan TKDN oleh Surveyor.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka menjamin:
  - a. pelaksanaan penghitungan TKDN dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Menteri ini; dan

- b. pelaksanaan prinsip-prinsip penghitungan TKDN oleh Surveyor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2).
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan pada proses penghitungan nilai TKDN, setelah disampaikannya laporan pelaksanaan verifikasi, atau setelah diterbitkan sertifikat TKDN.

#### Pasal 29

- (1) Apabila berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh Surveyor, Menteri dapat mencabut penetapan Surveyor.
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapuskan pengenaan sanksi lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 30

- (1) Direktur Jenderal melakukan pengawasan terhadap konsistensi produksi sesuai nilai TKDN yang dimiliki oleh Pemohon.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

#### Pasal 31

- (1) Apabila berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh Pemohon, Menteri mencabut sertifikat TKDN yang telah diterbitkan.
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapuskan pengenaan sanksi lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 9 Februari 2017

MENTERI PERINDUSTRIAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AIRLANGGA HARTARTO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 13 Februari 2017

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 274

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Jenderal  
Kementerian Perindustrian  
Kasubid Biro Hukum dan Organisasi,



A. Cahyanto



LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 04/M-IND/PER/2/2017

TENTANG KETENTUAN DAN TATA CARA PENILAIAN TINGKAT  
KOMPONEN DALAM NEGERI UNTUK PEMBANGKIT LISTRIK  
TENAGA SURYA

FORMAT SURAT PERMOHONAN PENGHITUNGAN  
NILAI TKDN PLTS

Nomor	:	Jakarta, ..... 20..
Lampiran	:	.... berkas
Perihal	:	Permohonan Penilaian TKDN PLTS
		Kepada Yth. Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika Kementerian Perindustrian Jl. Gatot Subroto Kav. 52-53 Jakarta Selatan

Dengan Hormat,

Bersama ini kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Perusahaan :  
Alamat Perusahaan :  
Verifikator :

Dengan ini mengajukan permohonan penghitungan TKDN PLTS untuk jenis PLTS Tersebar Berdiri Sendiri/Terpusat Berdiri Sendiri/Terpusat Terhubung \*) dengan data-data pendukung sebagaimana terlampir.

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami mengucapkan terima kasih.

Hormat kami,

.....  
Direktur Utama Perusahaan

Keterangan :

\*) pilih salah satu

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Jenderal  
Kementerian Perindustrian  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



Eka Cahyanto

MENTERI PERINDUSTRIAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AIRLANGGA HARTARTO

LAMPIRAN II

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 04/M-IND/PER/2/2017

TENTANG KETENTUAN DAN TATA CARA PENILAIAN TINGKAT  
KOMPONEN DALAM NEGERI UNTUK PEMBANGKIT LISTRIK  
TENAGA SURYA

Formulir 2.1 Format Penilaian Sendiri TKDN PLTS Tersebar Berdiri Sendiri

Nama Perusahaan :					
Alamat :					
Jenis Produk :					
Merek :					
No	Komponen	TKDN (%)	Bobot (%)	Nilai (%)	TKDN Gabungan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A. Barang					
1	Modul Surya		40,50%		
2	Baterai		22,05%		
3	<i>Battery Control Unit</i>		10,59%		
4	Penyangga modul		6,30%		
5	Kabel		7,94%		
6	Assesoris		2,65%		
<b>Jumlah A</b>			<b>(A4)</b>		<b>(A6)</b>
<b>Total % TKDN Gabungan A</b>		<b>(A7)</b>			
B. Jasa					
1	Pengiriman		6,67%		
2	Pemasangan		3,33%		
<b>Jumlah B</b>			<b>(B4)</b>		<b>(B6)</b>
<b>Total % TKDN Gabungan B</b>		<b>(B7)</b>			
<b>% TKDN Gabungan Barang dan Jasa</b>					<b>(A6 + B6)</b>

Contoh Formulir 2.1 Format Penilaian Sendiri TKDN PLTS Tersebar Berdiri Sendiri yang sudah diisi

Nama Perusahaan : .....					
Alamat : .....					
Jenis Produk : .....					
Merek : .....					
No	Komponen	TKDN (%)	Bobot (%)	Nilai (%)	TKDN Gabungan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>A. Barang</b>					
1	Modul Surya	40,00%	40,50%	16,20%	
2	Baterai	40,00%	22,05%	8,82%	
3	<i>Battery Control Unit</i>	10,00%	10,59%	1,06%	
4	Kabel	90,00%	7,94%	7,15%	
5	Penyangga modul	42,40%	6,30%	2,67%	
6	Assesoris	0,00%	2,65%	0,00%	
<b>Jumlah A</b>			<b>90,00%</b>		<b>35,90%</b>
<b>% TKDN Barang</b>		<b>39,87%</b>			
<b>B. Jasa</b>					
1	Pengiriman	100,00%	6,67%	6,67%	
2	Pemasangan	100,00%	3,33%	3,33%	
<b>Jumlah B</b>			<b>10,00%</b>		<b>10,00%</b>
<b>% TKDN Jasa</b>		<b>100,00%</b>			
<b>% TKDN Gabungan Barang dan Jasa</b>					<b>45,90%</b>

Cara Pengisian Formulir 2.1:

No.	Kolom	Informasi	Penjelasan	Contoh Pengisian
1.	No. (1)	Nomor	Nomor urut	1.
2.	No. (2)	Komponen	Komponen-komponen berupa barang dan jasa dalam pembangunan PLTS	1. Modul surya 2. Baterai 3. Battery Control Unit 4. dsb
3.	No. (3)	TKDN (%)	Persentase TKDN minimum per komponen penyusun PLTS	40,00%
4.	No. (4)	Bobot (%)	Persentase bobot yang telah ditentukan sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (2)	40,50%
5.	No. (5)	Nilai (%)	Nilai TKDN per komponen yang diperoleh dari perkalian kolom (3) dengan kolom (4)	16,20%
6.	No. (6)	TKDN Gabungan (%)	Total nilai TKDN pada kolom (5) untuk barang, jasa, dan gabungan barang dan jasa.	35,90%

Formulir 2.2 Format Penilaian Sendiri TKDN PLTS Terpusat Berdiri Sendiri

Nama Perusahaan :					
Alamat :					
Jenis Produk :					
Merek :					
No	Komponen	TKDN (%)	Bobot (%)	Nilai (%)	TKDN Gabungan Barang dan Jasa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A. Barang					
1	Baterai		25,20%		
2	Penyangga modul		20,70%		
3	Inverter dan <i>Solar Charge Controler</i>		13,50%		
4	Modul surya		13,14%		
5	Kabel (AC dan DC)		7,20%		
6	DC <i>combiner box</i>		3,06%		
7	<i>Distribution panel</i>		2,70%		
8	<i>Energy limiter</i>		2,70%		
9	Sistem Proteksi		1,80%		
<b>Jumlah A</b>			<b>(A4)</b>		
<b>% TKDN Barang</b>		<b>(A7)</b>			
B. Jasa					
1	Pengiriman		4,67%		
2	Pemasangan		3,33%		
3	Konstruksi		2,00%		
<b>Jumlah B</b>			<b>(B4)</b>		<b>(B6)</b>
<b>% TKDN Jasa</b>		<b>(B7)</b>			
<b>% TKDN Gabungan Barang dan Jasa</b>					<b>(A6 + B6)</b>

Contoh Formulir 2.2 Format Penilaian Sendiri TKDN PLTS Terpusat Berdiri Sendiri yang sudah diisi

Nama Perusahaan :					
Alamat :					
Jenis Produk :					
Merek :					
No	Komponen	TKDN (%)	Bobot (%)	Nilai (%)	TKDN Gabungan Barang dan Jasa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>A. Barang</b>					
1	Baterai	40,00%	25,20%	10,08%	
2	Penyangga modul	42,40%	20,70%	8,78%	
3	Inverter dan <i>Solar Charge Controller</i>	0,00%	13,50%	0,00%	
4	Modul Surya	40,00%	13,14%	5,26%	
5	Kabel (AC dan DC)	90,00%	7,20%	6,48%	
6	<i>DC combiner box</i>	20,00%	3,06%	0,61%	
7	Distribution Panel	40,00%	2,70%	1,08%	
8	Energy Limiter	40,00%	2,70%	1,08%	
9	Sistem Proteksi	20,00%	1,80%	0,36%	
<b>Jumlah A</b>			<b>90,00%</b>		<b>33,72%</b>
<b>% TKDN Barang</b>					<b>37,47%</b>
<b>B. Jasa</b>					
1	Pengiriman	100,00%	4,67%	4,67%	
2	Pemasangan	100,00%	3,33%	3,33%	
3	Konstruksi	100,00%	2,00%	2,00%	
<b>Jumlah B</b>			<b>10,00%</b>		<b>10,00%</b>
<b>% TKDN Jasa</b>					<b>100,00%</b>
<b>% TKDN Gabungan Barang dan Jasa</b>					<b>43,72%</b>

Cara Pengisian Formulir 2.2:

No.	Kolom	Informasi	Penjelasan	Contoh Pengisian
1.	No. (1)	Nomor	Nomor urut	1.
2.	No. (2)	Komponen	Komponen-komponen berupa barang dan jasa dalam pembangunan PLTS	1. Modul surya 2. Baterai 3. Battery Control Unit
3.	No. (3)	TKDN (%)	Persentase TKDN minimum per komponen penyusun PLTS	40,00%
4.	No. (4)	Bobot (%)	Persentase bobot yang telah ditentukan sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (2)	40,50%
5.	No. (5)	Nilai (%)	Nilai TKDN per komponen yang diperoleh dari perkalian kolom (3) dengan kolom (4)	16,20%
6.	No. (6)	TKDN Gabungan (%)	Total nilai TKDN pada kolom (5) untuk barang, jasa, dan gabungan barang dan jasa.	35,90%

Formulir 2.3 Format Penilaian Sendiri TKDN PLTS Terpusat Terhubung

Nama Perusahaan : Alamat : Jenis Produk : Merek :					
No	Komponen	TKDN (%)	Bobot (%)	Nilai (%)	TKDN Gabungan Barang dan Jasa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>A. Barang</b>					
1	Modul surya		40,50%		
2	Inverter		13,50%		
3	Penyangga modul		10,80%		
4	Distribution panel		6,30%		
5	Travo		5,40%		
6	DC combiner box		5,40%		
7	Sistem Proteksi		4,50%		
8	Kabel (AC dan DC)		3,60%		
<b>Jumlah A</b>			<b>(A4)</b>		<b>(A6)</b>
<b>% TKDN Barang</b>		<b>(A7)</b>			
<b>B. Jasa</b>					
1	Pengiriman		2,20%		
2	Pemasangan		5,40%		
3	Konstruksi		2,40%		
<b>Jumlah B</b>			<b>(B4)</b>		<b>(B6)</b>
<b>% TKDN Jasa</b>		<b>(B7)</b>			
<b>% TKDN Gabungan Barang dan Jasa</b>					<b>(A6 + B6)</b>

Contoh Formulir 2.3 Format Penilaian Sendiri TKDN PLTS Terpusat Terhubung yang sudah diisi

Nama Perusahaan : ..... Alamat : ..... Jenis Produk : ..... Merek : .....					
No	Komponen	TKDN (%)	Bobot (%)	Nilai (%)	TKDN Gabungan Barang dan Jasa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>A. Barang</b>					
1	Modul Surya	40,00%	40,50%	16,20%	
2	Inverter	0,00%	13,50%	0,00%	
3	Modul <i>Support</i> / Tiang	42,40%	10,80%	4,6%	
4	Distribution Panel	40,00%	6,30%	2,52%	
5	<i>DC combiner box</i>	20,00%	5,40%	1,08%	
6	Travo	40,00%	5,40%	2,16%	
7	Sistem Proteksi	20,00%	4,50%	0,90%	
8	Kabel (AC dan DC)	90,00%	3,60%	3,24%	
<b>Jumlah A</b>			<b>90,00%</b>		<b>30,68%</b>
<b>% TKDN Barang</b>					<b>34,09%</b>
<b>B. Jasa</b>					
1	Pengiriman	100,00%	2,20%	2,20%	
2	Pemasangan	100,00%	5,40%	5,40%	
3	Konstruksi	100,00%	2,40%	2,40%	
<b>Jumlah B</b>			<b>10,00%</b>		<b>10,00%</b>
<b>% TKDN Jasa</b>					<b>100,00%</b>
<b>% TKDN Gabungan Barang dan Jasa</b>					<b>40,68%</b>

Cara Pengisian Formulir 2.3:

No.	Kolom	Informasi	Penjelasan	Contoh Pengisian
1.	No. (1)	Nomor	Nomor urut	1.
2.	No. (2)	Komponen	Komponen-komponen berupa barang dan jasa dalam pembangunan PLTS	1. Modul surya 2. Baterai 3. Battery Control Unit 4. dsb
3.	No. (3)	TKDN (%)	Persentase TKDN minimum per komponen penyusun PLTS	40,00%
4.	No. (4)	Bobot (%)	Persentase bobot yang telah ditentukan sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (2)	40,50%
5.	No. (5)	Nilai (%)	Nilai TKDN per komponen yang diperoleh dari perkalian kolom (3) dengan kolom (4)	16,20%
6.	No. (6)	TKDN Gabungan (%)	Total nilai TKDN pada kolom (5) untuk barang, jasa, dan gabungan barang dan jasa.	35,90%

MENTERI PERINDUSTRIAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AIRLANGGA HARTARTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Jenderal  
Kementerian Perindustrian  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



Eko S.A. Cahyanto



LAMPIRAN III

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR

TENTANG KETENTUAN DAN TATA CARA PENILAIAN TINGKAT

KOMPONEN DALAM NEGERI UNTUK PEMBANGKIT LISTRIK

TENAGA SURYA

FORMAT PERSETUJUAN PENILAIAN TKDN

Nomor : /ILMATE/10/2016 Jakarta,  
Lampiran :  
Perihal : Surat Persetujuan Kepada Yth,  
Penilaian TKDN Pimpinan PT. ....  
Di -  
Tempat

Berdasarkan surat PT. .... nomor ..... tanggal ..... perihal permohonan Persetujuan Penilaian Tingkat Komponen Dalam Negeri dengan memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor ...../M-IND/PER/11/2016 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penilaian Tingkat Komponen Dalam Negeri untuk Pembangkit Listrik Tenaga Surya, maka dengan ini Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika, Kementerian Perindustrian menerangkan bahwa:

Nama Perusahaan PT. ....  
Alamat Perusahaan .....  
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) .....  
Merek dan Type Produk yang .....  
didaftarkan .....  
Surveyor yang ditunjuk .....

disetujui untuk dilakukan verifikasi atas capaian Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri untuk produk yang didaftarkan, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Surat ini berlaku untuk 1 (satu) kali pengajuan permohonan penilaian TKDN.
2. Surat ini merupakan dokumen prasyarat dalam proses penerbitan laporan hasil verifikasi/sertifikat Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Pembangkit Listrik Tenaga Surya/Modul Surya\*).

Demikian Surat Persetujuan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Direktur Jenderal

.....

Tembusan :

1. Sesditjen ILMATE;
2. Direktur Industri Elektronika dan Telematika;
3. Direktur Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian;
4. Surveyor;
5. Peninggal.

Keterangan :

\*) pilih salah satu

MENTERI PERINDUSTRIAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AIRLANGGA HARTARTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Jenderal  
Kementerian Perindustrian  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



Eko S.A. Cahyanto

LAMPIRAN IV

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR

TENTANG KETENTUAN DAN TATA CARA PENILAIAN TINGKAT

KOMPONEN DALAM NEGERI UNTUK PEMBANGKIT LISTRIK

TENAGA SURYA

FORMAT PENOLAKAN PENILAIAN TKDN

Nomor : /ILMATE/10/2016 Jakarta,  
Lampiran :  
Perihal : Surat Penolakan Kepada Yth,  
Penilaian TKDN Pimpinan PT. ....  
Di -  
Tempat

Berdasarkan surat PT. .... nomor ..... tanggal ..... perihal permohonan Persetujuan Penilaian Tingkat Komponen Dalam Negeri dengan memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor ...../M-IND/PER/11/2016 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penilaian Tingkat Komponen Dalam Negeri untuk Pembangkit Listrik Tenaga Surya, maka dengan ini Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika, Kementerian Perindustrian menerangkan bahwa:

Nama Perusahaan PT. ....

Alamat Perusahaan .....

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) .....

Merek dan Type Produk yang didaftarkan .....

Surveyor yang ditunjuk .....

ditolak untuk dilakukan verifikasi atas capaian Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Pembangkit Listrik Tenaga Surya/Modul Surya\*) yang didaftarkan, dengan mempertimbangkan:

1. ....

2. ....

Demikian Surat Penolakan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Direktur Jenderal

.....

Tembusan :

1. Seditjen ILMATE;
2. Direktur Industri Elektronika dan Telematika;
3. Direktur Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian;
4. Surveyor;
5. Peninggal.

Keterangan :

\*) pilih salah satu

MENTERI PERINDUSTRIAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AIRLANGGA HARTARTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Jenderal  
Kementerian Perindustrian  
Kebijakan Hukum dan Organisasi,



LAMPIRAN V

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 04/M-IND/PER/2/2017

TENTANG KETENTUAN DAN TATA CARA PENILAIAN TINGKAT

KOMPONEN DALAM NEGERI UNTUK PEMBANGKIT LISTRIK

TENAGA SURYA

FORMAT SURAT PERMOHONAN PENGHITUNGAN

NILAI TKDN MODUL SURYA

Nomor	:	Jakarta, ..... 20..
Lampiran	:	.... berkas
Perihal	:	Permohonan Penilaian TKDN Modul Surya
		Kepada Yth. Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika Kementerian Perindustrian Jl. Gatot Subroto Kav. 52-53 Jakarta Selatan

Dengan Hormat,

Bersama ini kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Perusahaan :  
Alamat Perusahaan :  
Verifikator :

Dengan ini mengajukan permohonan Penerbitan sertifikat  
TKDN dengan data sebagaimana terlampir untuk :

Jenis Produk :  
Merek :  
Tipe :

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan. Atas  
perhatian dan kerjasamanya, kami mengucapkan terima  
kasih.

Hormat kami,

.....  
Direktur Utama Perusahaan

MENTERI PERINDUSTRIAN

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

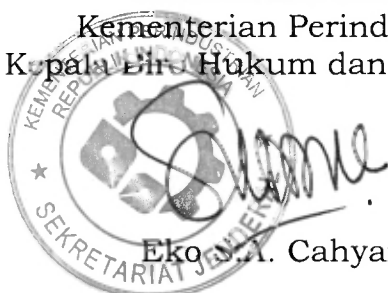
AIRLANGGA HARTARTO

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Jenderal

Kementerian Perindustrian

Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



Eko A. Cahyanto

## LAMPIRAN VI

## PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 04/M-IND/PER/2/2017

TENTANG KETENTUAN DAN TATA CARA PENILAIAN TINGKAT  
KOMPONEN DALAM NEGERI UNTUK PEMBANGKIT LISTRIK  
TENAGA SURYA

## FORMAT PENILAIAN SENDIRI TKDN UNTUK PRODUK MODUL SURYA

Nama Perusahaan :					
Alamat :					
Jenis Produk :					
Merek :					
No	Komponen Modul Surya	Kriteria		Bobot	TKDN (%)
		Dalam Negeri	Luar Negeri		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Material (95%)					
1	Solar Cell				
	Pengadaan pasir silika			2,50%	
	Pembuatan <i>silicon metallurgical grade</i>			7,50%	
	Pembuatan <i>silicon solar grade</i>			15,00%	
	Pembuatan ingot			5,00%	
	Pembuatan <i>brick</i>			2,50%	
	Pembuatan <i>wafer</i>			2,50%	
	Pembuatan <i>blue cell</i>			7,50%	
	<i>Printing cell</i>			7,50%	
2	Tempered Glass			12,00%	
3	PV Junction Box			8,00%	
4	Backsheet			4,00%	
5	Frame			9,00%	
6	Film Eva			4,00%	
7	PV Ribbon			2,00%	
8	Solar Silicon			2,00%	
Tenaga Kerja (5%)					
9	Tenaga Kerja Langsung			5,00%	
Mesin produksi (4%)					
10	Mesin Produksi			4,00%	
<b>Total bobot</b>				100,00%	
<b>Total TKDN</b>					

Contoh Format Penilaian Sendiri TKDN untuk produk Modul Surya yang sudah diisi:

Nama Perusahaan : ..... Alamat : ..... Jenis Produk : ..... Merek : .....					
No	Komponen Modul Surya	Kriteria		Bobot (%)	TKDN (%)
		Dalam Negeri	Luar Negeri		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Material (95%)					
1	Solar Cell				
	- Pengadaan pasir silika		✓	2,50%	0,00%
	- Pembuatan <i>silicon metallurgical grade</i>		✓	7,50%	0,00%
	- Pembuatan <i>silicon solar grade</i>		✓	15,00%	0,00%
	- Pembuatan ingot		✓	5,00%	0,00%
	- Pembuatan <i>brick</i>		✓	2,50%	0,00%
	- Pembuatan <i>wafer</i>		✓	2,50%	0,00%
	- Pembuatan <i>blue cell</i>	✓		7,50%	7,50%
	- <i>Printing cell</i>	✓		7,50%	7,50%
2	Tempered Glass		✓	12,00%	0,00%
3	PV Junction Box	✓		8,00%	8,00%
4	Backsheet		✓	4,00%	0,00%
5	Frame	✓		9,00%	9,00%
6	Film Eva		✓	4,00%	0,00%
7	PV Ribbon		✓	2,00%	0,00%
8	Solar Silicon		✓	2,00%	0,00%
Tenaga Kerja (5%)					
9	Tenaga Kerja Langsung	✓		5,00%	5,00%
Mesin produksi (4%)					
10	Mesin produksi	✓		4,00%	4,00%
<b>Total bobot</b>				100,00%	
<b>Total TKDN</b>					41,00%

Cara Pengisian Formulir Penilaian Sendiri TKDN untuk produk Modul Surya:


No.	Kolom	Informasi	Penjelasan	Contoh Pengisian
1.	No. (1)	Nomor	Nomor urut	1.
2.	No. (2)	Komponen Modul Surya	Komponen-komponen berupa barang, tenaga kerja langsung maupun mesin produksi untuk menghasilkan produk modul surya	1. Solar cell 2. Tempered glass 3. PV ribbon 4. dsb
3.	No. (3)	Dalam Negeri	Kriteria asal komponen penyusun modul surya yang berasal dari dalam negeri	Tanda centang (v)
4.	No. (4)	Luar Negeri	Kriteria asal komponen penyusun modul surya yang berasal dari luar negeri	Tanda centang (v)
5.	No. (5)	Bobot	Besaran bobot yang ditentukan pada masing-masing komponen penyusun modul surya	50,00%
6.	No. (6)	TKDN (%)	Nilai TKDN yang dihasilkan sesuai dengan Pasal 5 ayat (5) dan Pasal 5 ayat (6)	0,00%
7.	Total bobot		Jumlah persentase bobot seluruh komponen pada kolom (5)	100,00%
8.	Total TKDN		Jumlah persentase TKDN yang dicapai dari seluruh komponen pada kolom (6)	41,00%

MENTERI PERINDUSTRIAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AIRLANGGA HARTARTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Jenderal  
Kementerian Perindustrian  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

  
Eko S.A. Cahyanto